

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN  
KREDIT PADA PT. BANK BRI AGRO KANTOR CABANG  
PEMBANTU TEBING TINGGI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : FEBRY RAMADHANI**  
**NPM : 1305170693**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

**FEBRY RAMADHANI. NPM. 1305170693. Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi. 2017. Skripsi**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi sudah berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan sistem pengendalian intern. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan untuk mendukung variabel penelitian ini adalah data kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data penelitian ini adalah teknik deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Bank BRI AGRO KCP Tebing Tinggi dikatakan baik dan efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih terpenuhi unsur pengendalian intern COSO. Tetapi masih ada kelemahan yang terjadi dalam pengendalian intern pada unsur aktivitas pengendalian dan penafsiran resiko, seperti masih lemahnya *Account Officer* dalam menganalisa kredit nasabah dan kelalaian ADK dalam memeriksa dokumen nasabah.

**Kata kunci:** *Sistem Pengendalian Internal, Pemberian Kredit*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bismillahirrahmanirrohim,*

Segala puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi**”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tepat waktu.

Dalam kesempatan ini Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada yang Tercinta Ayahanda Yuliardi dan Ibunda Suarsih, serta Abangku Fani Sumirza, Kakakku Sekar Indah Sari, Adikku M. Rizky atas segala do'a dan dukungannya serta pengorbanan baik moral maupun materil yang telah diberikan kepada Penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE., MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
7. Ibu Henny Zurika Lubis, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang banyak membantu dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, selaku staff pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
9. Bapak Abdul Hanan Panjaitan selaku Pimpinan dan juga karyawan di PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi.
10. Teman – teman seperjuangan Dewi Yulina, Yuni Kartika, Diah Putri, Yeni Delima, Dwiki Septiansyah, Irwansyah, Patra Anggono, Irwanda dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu di jurusan Akuntansi terutama di kelas E Akuntansi Siang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Untuk Fajrul Huda dan Chairyan Hadi yang telah mendukungku dari kita masih Sekolah Menengah Atas sampai sekarang. *You are the best guys.*

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang berguna bagi kelengkapan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan.

Medan, Oktober 2017

Penulis

**FEBRY RAMADHANI**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>9</b>
A. Uraian Teoritis.....	9
B. Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Berpikir.....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Definisi Operasional.....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Hasil Penelitian.....	40
B. Pembahasan.....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel III.1 Kisi-kisi Wawancara .....	36
Tabel III.2 Waktu Penelitian .....	36

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar I I.1 Kerangka Konseptual.....	34
Gambar IV.1 Flowchart Prosedur Pemrakarsa dan Permohonan Kredit .....	41
Gambar IV.2 Flowchart Prosedur Analisis dan Evaluasi Kredit .....	44
Gambar IV.3 Flowchart Prosedur Pemutusan Pemberian Kredit.....	47
Gambar IV.4 Flowchart Prosedur Pencairan Kredit.....	48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah penting. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa dari perbankan, baik dari perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan.

Di Indonesia sendiri lembaga perbankan merupakan mitra usaha yang sangat penting bagi perusahaan industri, perusahaan dagang, maupun perusahaan jasa. Perusahaan-perusahaan tersebut membutuhkan dana yang cukup besar dalam upaya membiayai kegiatan usahanya. Kemudahan dalam penyediaan dana untuk operasional perusahaan tersebut dapat diperoleh dari fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perbankan. Oleh karena itu, perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam kehidupan perekonomian.

Peranan industri perbankan dalam rangka penunjang perekonomian dapat dilakukan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan sumber perolehan dana bank berasal dari simpanan atau tabungan masyarakat yang dimasukkan dalam bank berupa giro, deposito, tabungan, dan sebagainya yang kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana terutama pada dunia usaha dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada nasabahnya.

UU No. 10 Tahun 1998 mengemukakan, Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengelolaan kredit yang dilakukan pihak bank adalah suatu hal yang penting dilakukan agar kredit dapat berjalan dengan baik dan meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar perhitungan. Melakukan pengelolaan kredit berarti melaksanakan fungsi manajemen, dimana dalam mengelola dan mengatur maka diorganisasikan, agar perencanaan yang matang. Kemudian setelah direncanakan maka diorganisasi, agar perencanaan tersebut lebih terarah. Organisasi sangat penting karena merupakan tempat bagi suatu bank dalam mencapai tujuannya. Pelaksanaan pengelolaan kredit dapat meningkatkan keuntungan bagi suatu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Kunci dari keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat. Dalam pemberian kredit, kepada pihak nasabah disuatu bank harus memiliki sistem pengendalian intern yang harus dilaksanaa sebaik-baiknya, dimana sistem pengendalian yang baik akan sangat membantu organisasi dalam menghindari atau kecurangan-kecurangan yang akan merugikan nasabah serta bank itu sendiri.

Pemberian kredit kepada masyarakat menjadi kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank peningkatan pemberian kredit oleh bank akan dapat meningkatkan pendapatan, yaitu berupa bunga atas kredit yang diberikan.

Pemberian kredit juga mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan, maka bank harus berusaha memperkecil resiko dalam pemberian kredit. dengan memaksimalkan bunga pinjaman, dan pemberian jaminan yang pantas untuk kredit yang diberikan, maka perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha dan menentukan eksistensi dimasa depannya, sehingga dapat tetap beroperasi dalam jangka waktu ke depan. Seandainya kredit kurang dikelola dengan baik maka akan banyak kredit yang bermasalah (*Non Performing Loan*), yang berakibat atas menurunnya pendapatan bunga serta menurunnya pokok kredit yang pada gilirannya akan menderita rugic dan bukan tidak memungkinkan pada akhirnya akan mengalami kebangkrutan (Rachmat Firdaus dan Maya Aryanti, 2011: hal 4)

PT. Bank BRI AGRO, Tbk Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi, sebagai salah satu Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang menyediakan pelayanan penyaluran dananya ke sektor kredit di daerah Tebing Tinggi. PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi sebagai suatu lembaga pengkreditan yang memiliki fungsi membantu masyarakat dalam membina perekonomian usaha kecil menengah, atau masyarakat yang ekonominya lemah yang bersifat konsumtif. Aspek terpenting dalam suatu kegiatan Bank BRI AGRO adalah Sistem Pengendalian Intern, karena Bank tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya Sistem Pengendalian Intern dalam kegiatannya.

Kegiatan perkreditan selalu menjadi hal yang selalu diperhatikan dikarenakan kegiatan perkreditan merupakan kegiatan utama Bank dalam menjalankan usahanya. Bank sebagai penyalur kredit kepada nasabah terkadang mengalami kesulitan yaitu adanya tunggakan kredit atau kredit macet. Faktor

yang menyebabkan kredit macet yang bisa menyebabkan kredit macet atau kredit bermasalah meliputi faktor eksternal dan faktor internal dari bank tersebut. Faktor eksternal seperti pihak nasabah dapat mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajiban kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet atau ada unsur tidak sengaja dimana debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu misalnya nasabah yang mengalami musibah seperti kematian, kena hama, kebajiran atau kebangkrutan usaha. Faktor internal berasal dari karyawan yaitu dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif, untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan kredit macet atau bermasalah maka diperlukan adanya pengendalian intern yang baik.

Menurut Seprida Hanum Hrp dalam buku Sistem Informasi Akuntansi (2015: hal 91) Sistem Pengendalian Intern COSO meliputi lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penafsiran resiko, informasi dan komunikasi, serta pengawasan. Dapat dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern pemberian kredit harus memenuhi unsur-unsur pengendalian intern COSO (*The Committee Of Sponsoring Organizations*).

Berdasarkan lima komponen pengendalian intern diatas, penulis menemukan ada beberapa fenomena dalam pemberian kredit, seperti ditemukan kelemahan dalam aktivitas pengendalian dimana AO (*Account Officer*) tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang ditetapkan oleh Bank dalam menganalisa kredit karena masih terjadi kelemahan dalam menalisis kredit calon nasabah menggunakan prinsip 5C (*character, capital, condition, capacity, collateral*). Seorang AO harus melakukan analisa nasabah

dengan mendalam agar pemberian kredit benar-benar dapat dipercaya. Analisa kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor lainnya. Tujuan dari analisa tersebut agar kredit yang diberikan benar-benar aman. Sehingga kredit yang telah diterima dapat kembali sesuai jangka waktu yang di tentukan. Jika salah dalam menganalisa kredit, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga berakibat sulit untuk ditagih atau macet (Kasmir, 2014: hal 112).

Fenomena lainnya dalam aktivitas pengendalian, dimana kelalaian Administrasi Kredit (ADK) menerima dan memeriksa dokumen yang diberikan calon nasabah seringkali kurang lengkap seperti tidak menunjukkan KTP asli serta tidak adanya NPWP. Ini bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 prinsip mengenal nasabah. Menurut Kasmir (2012: hal 98) Dalam aspek yuridis/hukum masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahaannya adalah seperti: Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keabsahan surat-surat yang dijaminan misalnya sertifikat tanah dan sertifikat deposito, serta dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya seperti KTP.

Hal ini disebabkan oleh keteledoran perusahaan mematuhi pereturan pemberian kredit yang telah digariskan, terlalu mudah membentkan kredit yang disebabkan tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan

kredit yang diajukan, serta kurang memadainya jumlah eksekutif dan staff bagian kredit yang berpengalaman. Ini didukung dengan teori COSO dimana pada komponen penafsiran resiko apabila ada kesalahan yang disebabkan oleh kecerobohan karyawan mengikuti prosedur tertentu dan karyawan yang tidak atau kurang terlatih.

Menurut COSO (*The Committee Of Sponsoring Organizations*) dalam buku Sistem Informasi Akuntansi (2015 : hal 91) menyatakan bahwa:

“pengendalian internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh staff karyawan dibawah arahan mereka dengan tujuan untuk memberikan jamaninan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian itu adalah efektivitas dan efisiensi operasi, reabilitas pelaporan keuangan, kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada”.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik memilih judul: **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi permasalahan yang penulis temukan adalah sebagai berikut :

1. Adanya kelamahan dalam menganalisa kredit calon nasabah-nasabah dengan prinsip 5C (*character, capital, condition, capacity, collateral*).
2. Masih adanya ditemukan dokumen tidak lengkap pada proses pengajuan kredit.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dan uraian mengenai latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT. Bank BRI AGRO telah berjalan secara efektif?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemberian kredit PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis yang masih masa pendidikan, dengan demikian masukan bagi penulis dapat memperoleh pengetahuan yang berguna khususnya mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit.
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam rangka menyupayakan peningkatan mutu kualitas dalam Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat dijadikan sebagai bahan refrensi dengan permasalahan yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pengertian Sistem Pengendalian Internal**

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu setentitas yang berinteraksi, dimana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.

Menurut Mulyadi (2010: hal 163) Pengendalian intern meliputi struktur Organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordiasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Jusup (2013: hal 252) Pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisari, manajemen, dan personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta efektifitas dan efisiensi operasi.

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) dalam buku Sistem Informasi Akuntansi (2015: hal 91) Pengertian pengendalian intern sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh staf

dan karyawan dibawah arahan mereka dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian.

## **2. Tujuan Sistem Pengendalian Internal**

Tujuan dari sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2010: hal 163) adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kekayaan organisasi
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
- c. Mendorong efisiensi, dan Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Mulyadi (2010: hal 163) Menyatakan bahwa “Tujuan dari sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administratif control*)”. Selanjutnya dikemukakan bahwa pengendalian intern, yang meliputi struktur organisasi, metode yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut COSO (*The Committee Of Sponsoring Organizations*) dalam buku Sistem Informasi Akuntansi (2015: hal 91) adapun tujuan pengendalian adalah sebagai berikut :

- a. Efektifitas dan efisiensi operasi
- b. Reliabilitas pelaporan keuangan.

- c. Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada.

### 3. Unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2010: hal 164) Unsur Pokok pengendalian internal dalam perusahaan adalah:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otoritas atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat kedalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian (*reliability*) yang tinggi.

- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya perlu adanya seleksi calon karyawan dan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan.

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization*) memperkenalkan lima unsur pengendalian intern, yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian.

Setiap organisasi, tidak akan peduli apakah perusahaan tersebut perusahaan besar atau kecil, tetapi perusahaan itu harus memiliki lingkungan pengendalian yang kuat. Jika lingkungan pengendalian internal lemah kemungkinan besar diikuti lemahnya komponen pengendalian internal yang lain. Lingkungan pengendalian meliputi faktor-faktor berikut:

1. Filosofi manajemen dan gaya operasi.

Manajer harusnya mengambil tindakan aktif untuk menjadi contoh berperilaku etis dengan bertindak sesuai dengan kode etik personal. Manajer juga bertanggung jawab menyusun kode etik perusahaan dan memperlakukan karyawan adil dan hormat.

2. Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.

Pentingnya bagi manajer untuk menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Perilaku etis atau tidak etis manajer dan karyawan berdampak besar terhadap keseluruhan pengendalian internal.

3. Komitmen terhadap kompetensi.

Perusahaan harus merekrut karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya guna mendorong kreatifitas dan inisiatif dalam menghadapi kondisi dinamis.

4. Komite audit dari dewan direksi

Dewan direksi bertanggung jawab untuk memilih komite audit yang beranggota orang-orang luar dari perusahaan. Peran komite audit adalah memantau akuntansi perusahaan serta praktik dan kebijakan pelaporan keuangan.

5. Struktur organisasi.

Perusahaan menggambarkan pembagian otoritas dan tanggung jawab perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

6. Metode penetapan otoritas dan tanggung jawab.

Hak yang dimiliki karena posisi formal seseorang untuk memberikan perintah ke bawah.

7. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.

Kegiatan sumber daya manusia meliputi perekrutan karyawan baru, orientasi karyawan baru, pelatihan karyawan, motivasi karyawan, evaluasi karyawan, promosi karyawan, kompensasi karyawan, perlindungan karyawan, dan pemberhentian karyawan.

b. Penaksiran Risiko.

Semua perusahaan, baik secara besar maupun kecil pasti menghadapi risiko internal maupun eksternal dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Risiko itu bersumber dari:

1. Tindakan tida sengaja.
2. Tindakan sengaja.
3. Bencana alam atau kerusakan politik.
4. Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan komputer.

c. Aktivitas Pengendalian.

Aktivitas pengenalian yang terkait dengan pelaporan keuangan antara lain meliputi:

1. Desain dokumen yang baik dan bernomor urut cetak.
2. Pemisahan tugas.
3. Otoritas yang memadai atas setiap transaksi bisnis yang terjadi.
4. Mengamankan harta dan catatan perusahaan.
5. Menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan karyawan.

d. Informasi dan Komunikasi.

Informasi harus diidentifikasi, diproses dan komunikasi ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Tujuan utama sistem informasi akuntansi antara lain:

1. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid.
2. Mengklasifikasi transaksi sebagaimana seharusnya.
3. Mencatat transaksi sesuai dengan nilai moneter yang tepat.
4. Mencatat transaksi pada periode yang tepat.
5. Menyajikan transaksi dan pada periode akuntansi yang tepat.

e. Pengawasan Kinerja.

Kegiatan utama dalam pengawasan kinerja meliputi:

1. Supervisi yang efektif meliputi pelatihan karyawan, memonitor kinerja karyawan, mengoreksi kesalahan yang dilakukan, serta mengamankan harta dengan mengawasi karyawan yang memiliki akses terhadap perusahaan.
2. Akuntansi pertanggung jawaban.
  - Ø Penyusunan anggaran, kuota, penjadwalan, harga pokok standart, dan standart kualitas.
  - Ø Laporan kinerja yang menadingakan kinerja aktual denagan rencana, dan menginformasikan jika ada penyimpangan yang signifikan.
  - Ø Prosedur untuk investasi penyimpangan yang signifikan dan mengambil tindakan untuk mengoreksi kondisi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.
3. Pengauditan Internal.
  - Ø Review terhadap reabilitas dan integeritas informasi operasional dan informasi finansial.
  - Ø Penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal.
  - Ø Evaluasi kepatuhan karyawan terhadap kebijakan, prosedur manajemen dan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.
  - Ø Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi manajemen

#### 4. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Makna dari kata kredit tersebut menunjukkan bahwa dasar dari pemberian kredit adalah berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan ini berarti seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di kemudian hari sanggup untuk memenuhi segala sesuatu yang telah menjadi perjanjian di antara kedua belah pihak (Kasmir, 2014: hal 112)

Pengertian menurut undang-undang perbankan No . 10 tahun 1998 yang dikutip oleh Kasmir (2014: hal 113) menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Rivai (2013: hal 197) Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberian kredit pada taggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut Hasibuan (2001: hal 87) Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali beserta bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Sastradipoera (2004: hal 151) Menyebutkan, Kredit adalah penyedia uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dan pihak lain yang dala hal ini

peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu.

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2001:II.8A.1) Mengartikan kredit sebagai: penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

## **5. Tujuan Kredit**

Menurut Kasmir (2014: hal 115) Tujuan kredit diantaranya:

### **a. Mencari keuntungan**

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. Hasil yang didapat dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

### **b. Membantu usaha nasabah**

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi dan dana modal kerja.

### **c. Membantu pemerintah**

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan makin semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

## 6. Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2014: hal 117) Memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain: Untuk meningkatkan daya guna uang. Jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh peneriman kredit. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh tambahan uang dari lainnya.

a. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengelolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

b. Meningkatkan peredaran uang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga barang yang beredar dapat bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah yang beredar.

c. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

d. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan usahanya dan nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

e. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, dalam hal meningkatkan pendapatan.

f. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberi kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya.

## **7. Unsur-unsur Kredit**

Menurut Kasmir (2014: hal 114) Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu, sebelum kredit diberikan harus dilakukan peneitian dan penyelidikan lebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan

tentang kondisi pemohon kredit sekarang masalah, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara di pemberi kredit dengan si penerima kredit. kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit diberikan.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. semakin panjang satu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun

risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa adanya unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

e. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga kredit juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

## **8. Jenis-Jenis Kredit**

Menurut Kasmir (2014:120) Ada beberapa jenis kredit diantaranya sebagai berikut:

a. Dilihat Dari Segi Kegunaan

1. Kredit Investasi

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha.

2. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

1. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi dan investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

3. Kredit perdagangan

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membeli aktivitas perdagangan.

c. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

1. Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3. Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengambilannya paling panjang yaitu tiga sampai lima tahun.

d. Dilihat Dari Segi Jaminan

1. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan

2. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

e. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha

1. Kredit pertanian

Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian

2. Kredit peternakan

Kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Kredit industri

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri kecil, industri menengah, dan industri besar.

4. Kredit pertambangan

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang.

5. Kredit pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

6. Kredit profesi

Kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional.

7. Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

8. Dan Sektor lainnya.

## 9. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum fasilitas kredit diberikan, maka bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali, keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan, untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pinjaman, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P, penilaian dengan analisis 5C menurut Kasmis (2014: hal136) adalah sebagai berikut:

### a. *Character* (Watak)

Sifat atau watak seseorang, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya.

### b. *Capacity* (Kapasitas)

Analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit, dari penilaian dapat terlihat kemampuan nasabah atau kreditur dalam mengelola bisnis, kemampuan ini dihubungkan dengan pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

### c. *Capital* (Modal)

Digunakan untuk melihat penggunaan modal, apakah efektif atau dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, sovabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

### d. *Condition* (Kondisi)

Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datangm penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

e. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

Sedangkan penilaian kredit dengan analisis 7P menurut Kasmir (2014: hal 138) adalah sabagai berikut:

a. *Personality* (Kepribadian)

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadian masa lalu.

b. *Party* (Kelompok)

Mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. *Purpose* (maksud atau tujuan)

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect* (Kemungkinan atau harapan)

Untuk menilai usaha calon nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment* (pembayaran)

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana kredit dikembalikan.

f. *Profitability* (Profitabilitas)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* diukur dari periode akan tetap sama atau semakin meningkatkan, dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. *Potection* (Perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

Menurut Ismail (2010:118) ada satu asas lagi yang harus dianalisis sebelum memberikan kredit yaitu asas 3R adalah sebagai berikut:

a. *Return* (Hasil)

Penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan dan begitu pula sebaliknya.

b. *Repayment* (Pemabayaran kembali)

Memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.

c. *Risk Bearing Ability* (Risiko bantalan kemampuan)

Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika risk bearing ability perusahaan besar maka kredit tidak diberikan dan sebaliknya.

## **10. Prosedur Pemberian Kredit**

Menurut Kasmir (2014: hal 143) Prosedur pemberian kredit secara umum oleh badan hukum adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan berkas-berkas

Permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal yang dilampiri berkas-berkas antara lain latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit, jangka waktu, dan cara pemohon mengembalikan kredit hingga jaminan kredit.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar agar permohonan kredit dapat segera diproses.

c. Wawancara I

Wawancara bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

d. *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas bila masih ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

f. Keputusan kredit

Yakni menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Bila ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

g. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian

Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah mananda tangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris.

h. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang perlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

i. Penyaluran atau penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan kredit.

### **11. Pengertian Kredit Macet**

Menurut Ismail (2010:125) Kredit macet merupakan melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.

Menurut Peraturan Kredit Indonesia No. 2/15/PBI/2000 Tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 9 yang berisi: Suatu kredit dikatakan bermasalah sejak tidak ditepatinya atau tidak di penuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya.

### **12. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet**

Menurut Kasmir dalam buku Dasar-Dasar Perbankan (2014: hal 148) ada dua faktor yang menyebabkan kredit macet yaitu:

1. Faktor Internal, artinya melakukan analisisnya, pihak analis kredit kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, terkena hama, banjir, kematian, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian, antara lain:

1. Jurnal Pemi Rosalina, Yuliasri Rahayu, 2014, "Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun Surabaya". Hasil penelitiannya yaitu sistem pengendalian internal pada pemberian kredit yang sudah diterapkan pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya memenuhi unsur-unsur pengendalian. Meskipun masih kurang melakukan pemantauan dan pemeriksaan yang rutin terhadap usaha para debitur.

2. Hendrik Elisa Sutejo Samosir, 2016, “Analisis Efektifitas Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Sidikalang”. Hasil penelitiannya adalah Telah tercapainya efektifitas pengendalian intern dimana telah pemisahan tugas, telah melaksanakan kebijakan ata peraturan yang telah ditetapkan, review terhadap pelaksanaan kredit, pejabat yang telah sesuai dengan keahliannya kompeten di bidangnya.
3. Clara Niken Dwi Haryani, 2014, “Analisis Pengendalian Intern Pada Sistem Pemberian Kredit Pada Credit Bererod Gratia KK Yogyakarta”. Hasil penelitiannya adalah Sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh CUBG KK Yogyakarta sudah memenuhi Sistem pemberian kredit COSO.
4. Muhammad Basir, 2013, “Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Makale”. Hasil penelitiannya adalah sistem pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Makale telah menggunakan prinsip 6C dan &7P dalam pemberian kredit kepada nasabah.

### **C. Kerangka Konseptual**

Pengendalian Intern atas Pemberian Kredit sangatlah penting mengingat pemberian kredit merupakan kegiatan utama Bank, kecurangan yang memungkinkan terjadinya pada bagian pemberian kredit yang bisa dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal oleh karena itu pemberiam kredit

harus mendapat pengawasan dan perhatian dengan benar untuk meminimalkan kredit macet.

Mengingat pentingnya kedudukan pemberian kredit tersebut, maka manajemen membutuhkan suatu pengendalian intern yang dapat meminimalkan kredit macet, pada PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi terdapat pengendalian yang cukup, apabila semua sistem, prosedur, kebijakan yang telah ditetapkan menjadi unsur dari pengendalian intern benar-benar efektif.

Pengendalian intern yang baik dimana mencakup komponen COSO yaitu: lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penafsiran resiko, informasi dan komunikasi, serta pengawasan.

Dimana dalam komponen lingkungan pengendalian mencakup struktur organisasi yang jelas. Setiap perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas. Dimana struktur organisasi yang memisahkan fungsi masing-masing jabatan yang berwenang.

Dalam komponen aktivitas pengendalian mencakup pemisahan fungsi tugas dan tanggung jawab. Setiap perusahaan harus memiliki pemisahan fungsi tugas agar karyawan tidak berpeluang untuk mencuri harta perusahaan dan memalsukan catatan-catatan akuntansi perusahaan.

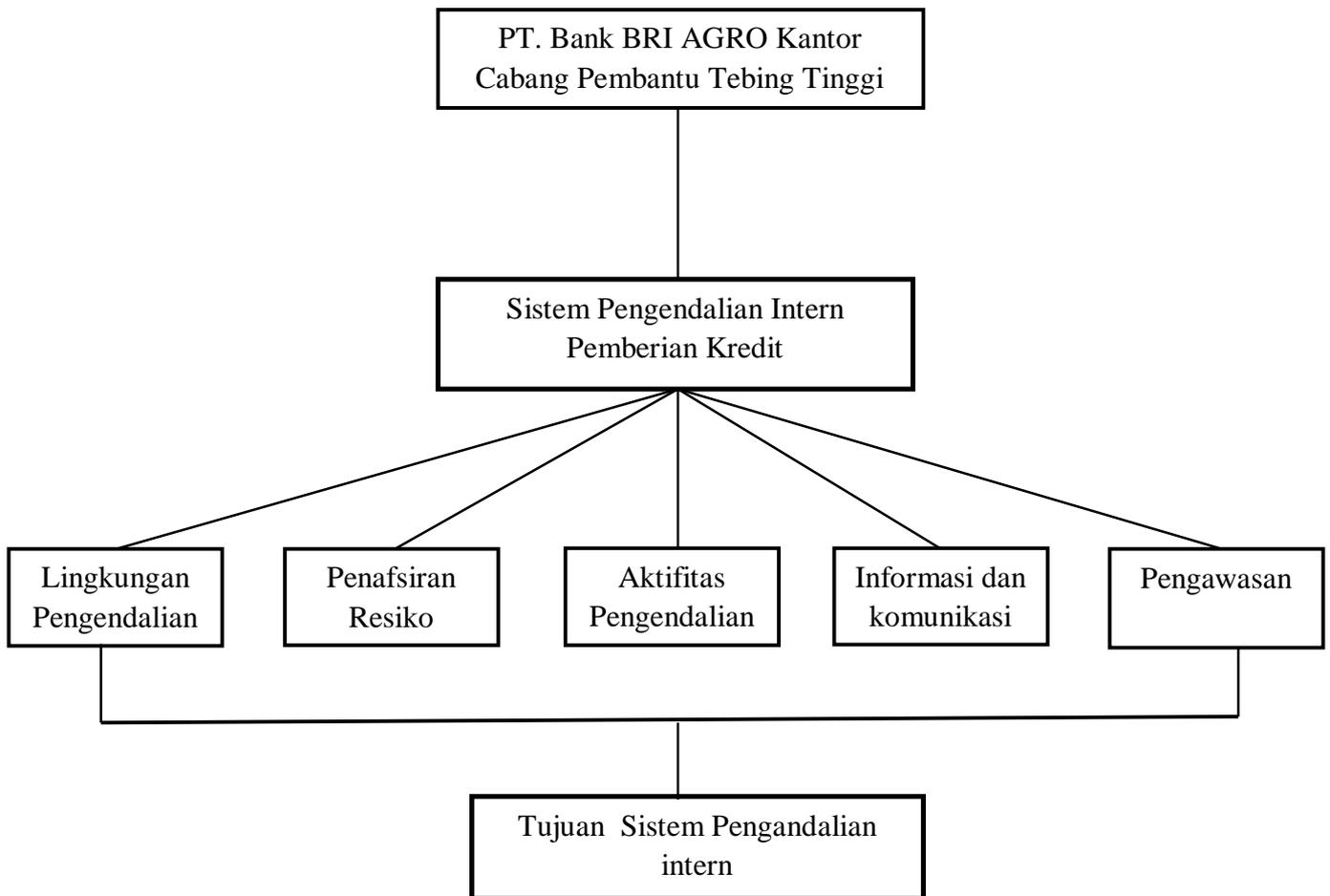
Dalam komponen penafsiran resiko pada pemberian kredit umumnya dicapai melalui karyawan yang berkompeten di bidangnya sehingga seseorang dapat melakukan suatu transaksi pada terjadinya pemberian kredit dari awal sampai akhir. Dengan adanya karyawan yang kompeten dibidangnya akan memudahkan bagi manajemen PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu

Tebing Tinggi untuk mengadakan penilaian dan pengambilan keputusan yang telah dilimpahkan pada masing-masing karyawan.

Dalam komponen informasi dan komunikasi harus mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid agar setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik.

Dalam komponen pengawasan, proses yang memungkinkan kualitas desain pengendalian internal serta operasinya berjalan. Pengawasan yang pada aktivitas yang berjalan dapat diwujudkan melalui intergerasi berbagai modul komputer yang terpisah ke dalam sistem informasi yang menangkap berbagai data penting dan memungkinkan pengujian pengendalian dilakukan sebagai bagian operasional rutin. Seperti supervise yang efektif dalam melakukan pelatihan terhadap karyawan, monitor kinerja karyawan, mengoreksi kesalahan yang mereka lakukan, serta mengamankan kerja harta dengan mengawasi karyawan yang memiliki akses terhadap harta perusahaan.

Dalam sistem pengendalian intern COSO memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuan, visi dan misi perusahaan. Agar terciptanya tujuan perusahaan yaitu: (1) efektifitas dan efisiensi operasi, (2) realibilitas pelaporan keuangan. (3) kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada.



Gambar II. 1 kerangka konseptual

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang terdapat pada riset yang dilakukan. Menurut Sugiyono (2007: hal 11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menetapkan pengukuran terhadap variabel-variabel yang diamati. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal pemberian kredit.

Sistem pengendalian intern pemberian kredit adalah proses penilaian dan pengawasan dalam pemebrian kredit agar proses pemberian kredit berjalan dengan lancar sesuai prosedur yang ditetapkan oleh penyelenggara kredit, menghindari terjadinya resiko-resiko dalam pemberian kredit seperti kredit macet, kesalahan dalam menganalisa, dan lainnya.

Tabel III.1  
Kisi-kisi Wawancara

Variabel	Elemen	No. Pertanyaan
Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit	Lingkungan pengendalian	1,2,3,4,5
	Aktivitas pengendalian	6,7,8,9,10,11,12,13
	Penafsiran resiko	14,15
	Informasi dan komunikasi	16,17,18,19
	Pengawasan	20,21
	Pemberian kredit	Flowchart

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 405C Tebing Tinggi.

#### Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan Juli 2017 yang akan berakhir pada bulan Oktober 2017 dengan rincian pada tabel dibawa ini.

Tabel III.2  
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Proses Pengajuan Judul	■																			
2	Penulisan Proposal							■	■	■	■	■	■								
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Acc Proposal															■	■				
5	Seminar																	■	■	■	■
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
7	Acc Skripsi																			■	■
8	Uji Komprehensif dan Meja Hijau																				■

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **Jenis Data**

Jenis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

### **Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer yang didapat dengan wawancara langsung dengan Kepala Cabang Pembantu dan *Accout Officer* PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi untuk mengetahui prosedur pengajuan kredit dan pengendalian internal yang diterapkan oleh PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan berupa data dan dokumen pendukung yang ada dalam pemberian kredit pada PT. Bang BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data dan

memperelajari secara langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang ada untuk diteliti. Adapun cara memperoleh data pada teknik tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara, dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan penelitian.
2. Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan data sekunder dari PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif yaitu kegiatan mengumpulkan, mengelola dan kemudian data observasi agar pihak lain dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) objek dari data analisis tersebut.

Tahapan analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, meliputi perumusan masalah, dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan dari penelitian yang diarahkan pada kegiatan pengumpulan data.
2. Memulai pengumpulan data, sebelum pengumpulan data dimulai, peneliti berusaha untuk menciptakan hubungan baik dengan menumbuhkan kepercayaan serta hubungan yang akrab dengan individu-individu yang menjadi sumber data.
3. Pengumpulan data dasar, pengumpulan data dengan wawancara yang lebih dalam, observasi, dan pengumpulan dokumen yang lebih detail dan lengkap.

4. Pengumpulan data penutup, pengumpulan data berakhir setelah peneliti menyelesaikan penelitian, dan tidak melakukan pengumpulan data lagi.
5. Membuat kesimpulan-kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi**

Sistem Pengendalian Intern Kredit bertujuan untuk mencapai portofolio kredit yang sehat serta menghindarkan kemungkinan timbulnya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank BRI AGRO dan terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat.

Sistem pengendalian intern kredit PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi mencakup Hal-hal Ssebagai berikut:

- a. Sistem pengendalian intern kredit BRI AGRO meliputi kebijakan perkreditan, organisasi perkreditan, dan prosedur perkreditan.
- b. Sistem pengendalian intern perkreditan diterapkan pada semua tahapan proses perkreditan mulai sejak penetapan Pasar Sasaran (PS), Penetapan Kreteria Risiko yang Dapat Diterima (KDR), permohonan kredit sampai dengan pelunasan.
- c. Prinsip pengawasan ganda harus diterapkan pada setiap tahap proses pemberian kredit, terutama yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan dan atau yang dapat menimbulkan kerugian keuangan BRI AGRO.
- d. Perencanaan ekspansi kredit yang memperhatikan kuliatas portofolio kredit.

- e. Perlindungan fisik terhadap surat berharga dan kekayaan BRI AGRO yang terkait perkreditan harus memadai.
- f. Adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap KUP dan prosedur pelaksanaan kredit dapat segera diketahui dan dilaporkan kepada Direksi atau pejabat yang berwenang.
- g. Kajian berkala terhadap efektifitas pengendalian intern kredit.

## **2. Flowchart dan Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi**

- a. Prosedur Pemrakarsa dan Permohonan Kredit

Gambar IV. Flowchart Prosedur Pemrakarsa dan Permohonan Kredit

### Prakarsa dan Permohonan Kredit

1. Permohonan kredit baru, perpanjangan jangka waktu, perubahan jumlah, perubahan struktur tipe dan syarat kredit, restruksi maupun penyelesaian kredit harus diajukan secara tertulis (dengan surat permohonan atau langsung menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP) ) oleh debitur dan dicatat oleh Administrasi Kredit (ADK) dalam Register Permohonan Kredit (Register SKPP).
2. Terhadap setiap permohonan kredit, Pejabat Pemrakarsa melakukan penilaian awal (*Pre-Screening*) dengan memperhatikan Antara lain Pasar Sasaran (PS), Kriteria resiko yang Dapat Diterima (KRD), jenis usaha yang dilarang

dibiayai, jenis usaha / pemebrian kredit yang perlu dihindari, daftar kredit macet BI, daftar hitam BI dan daftar hitam BRI AGRO.

Apabila dari hasil penilaian awal tersebut ternyata usaha debitur tidak termasuk dalam PS dan KRD dan atau termasuk jenis usaha yang dilarang untyk dibiayai dan atau termasuk dalam jenis usaha / pemebrian kredit yang perlu dihindari, dan atau termasuk daftar kredit macet BI, dan atau daftar hitam BI, dan atau termasuk daftar hitam BRI AGRO, maka Pejabat Pemrakarsa dapat langsung menetapkan kreditnya ke dalam klasifikasi *Reject/Tolak*.

3. Prakarsa yang termasuk kategori *performing loan* (kualitas lancar dan DPK) dengan klasifikasi *Accept/Terima*.
4. Pejabat Pemrakarsa melakukan pencairan informasi yang relevan dari berbagai sumber mengenai pemohon yang menunjang analisis dan evaluasi terhadap 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) kredit pemohon.
5. Pejabat pemrakarsa harus meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk kelengkapan dokumennya (identitas debitur fotocopy KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Identitas usaha Debitur).
6. Apabila dalam penilaian awal diketahui bahwa permohonan kredit tidak dapat dilayani, maka permohonan tersebut boleh

langsung ditolak tanpa harus diadakan analisis dan evaluasi lebih lanjut. Namun tetap harus dicatat dalam Register SKPP

Terhadap permohonan kredit yang dapat dilayani atau dilanjutkan proses kreditnya, karena tidak termasuk dalam klasifikasi *Reject/Tolak* harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Permohonan Kredit (SKPP) dan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) serta dokumen lainnya.

Putusan penolakan kredit dengan formulir Putusan Penolakan Kredit dengan memberikan alasan penolakannya dan kepada pemohon yang bersangkutan diberikan pemberitahuan secara tertulis.

b. Prosedur Analisis dan Evaluasi Kredit

Gambar IV.2 Flowchart Prosedur Analisis dan Evaluasi Kredit

Analisis dan Evaluasi Kredit

1. Pejabat Pemrakarsa harus mencari data dan informasi antara lain melalui:
  - a. Kunjungan ke domisili pemohon,
  - b. Wawancara dengan pemohon,
  - c. Kunjungan ke lokasi usaha pemohon,

- d. Wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengetahui karakter pemohon, bisnis pemohon, dan keterangan-keteranganlain yang diperlukan,
  - e. Penyelidikan tentang tujuan penggunaan kredit
  - f. Kunjungan ke lokasi agunan pemohon untuk mengetahui kebenarannya dan menilai agunan,
  - g. Penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon, misalnya laporan keuangan, legalitas usaha dan sebagainya.
2. Analisis dan evaluasi dituangkan secara lengkap dalam suatu Memorandum Analisis Kredit (MAK).
  3. Memorandum Analisis Kredit memuat hal-hal berikut:
    - a. Identitas pemohon seperti: Nama pemohon, tempat kedudukan (domisili)/alamat (rumah, kantor, pabrik, & toko), bentuk usaha, bidang/jenis usaha, susunan pengurusan, legalitas usaha/pemohon (NPWP, akte pendirian badan usaha, TDP, SIUP,SITU, TDR, Surat Keterangan Usaha)
    - b. Tujuan permohonan kredit seperti: jumlah kredit, jenis kredit, obyek yang dibiayai, dan jangka waktu
    - c. Riwayat hubungan bisnis dengan Bank
    - d. Analisis 5C kredit
      1. Analisis watak seperti: reputasi bisnis, riwayat perusahaan, catatan kriminal, riwayat, hidup atau

riwayat pernikahan, gaya hidup, tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan, tingkat hubungan kerjasama dengan BRI AGRO, kecenderungan berbisnis selama ini, budaya perusahaan, legalitas usaha pemohon, akte pendirian badan usaha, informasi Bank (BI), rekan bisnis, pesaing, dsb. Pejabat pemrakarsa agar berhati-hati dalam memproses pemberian kredit kepada pemohon yang diragukan kemauan membayar atau itikad baiknya.

2. Analisis Kemampuan seperti: tingkat kemampuan membayar diperoleh dari hasil usaha obyek yang dibiayai oleh BRI AGRO.
3. Analisis modal, untuk mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri. Pejabat pemrakarsa harus menganalisis secara cermat informasi yang didapat.
4. Analisis kondisi/prospek usaha, untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang hendak dibiayai, pejabat pemrakarsa harus melakukan analisis terhadap kondisi makro usaha/ industri sejenisnya.
5. Analisis agunan kredit, beberapa hal yang diperhatikan dalam analisis aguna kredit adalah: fungsi agunan, agunan pokok, agunan tambahan, dan aguna kredit konsumtif.

4. Setelahnya pejabat pemrakarsa meneruskan paket permohonan kredit yang sudah dianalisis, dievaluasi serta sudah direkomendasikan diterima oleh ADK dan dicatat dalam Register Permohonan Kredit selanjutnya diteruskan kepada pejabat pemutus di Kancapem untuk mendapat putusan.

c. Prosedur Pemutusan Pemberian Kredit

Gambar IV.3 Flowchart Prosedur Pemutusan Pemberian Kredit

Pemutusan Pemberian Kredit

1. Pejabat Pemutus yaitu pimpinan cabang pembantu menerima paket kredit berikut formulir PTK dari pejabat pemrakarsa melalui ADK.
2. Melakukan peninjauan kembali analisis dan evaluasi paket permohonan kredit dari pejabat pemrakarsa.
3. Jika semua telah dilakukan sebagaimana yang diterapkan oleh Pedomanan Pelaksana Kredit, maka pejabat pemutus melakukan putusan kredit. ADK memcatat pada register Putusan Kredit.

4. ADK menerima paket Putusan dari pemutus selanjutnya menyiapkan surat penolakan/ surat penawaran putusan kredit (*offering letter*).

Jika *Reject*/Tolak maka, ADK menyiapkan surat penolakan yang akan di berikan kepada pemohon. Jika *Accept*/Terima, maka ADK menyiapkan surat penawaran putusan kredit yang akan diberikan kepada pemohon untuk dibaca dan kemudian menyetujui dan atau tidak menyetujui penawaran putusan kredit tersebut.

d. Prosedur Pencairan Kredit

Gambar IV.4 Flowchart Prosedur Pencairan Kredit

Prosedur pencairan kredit

1. Berdasarkan putusan kredit yang telah disetujui, ADK mencatat tanggal putusan kredit dalam Registrasi Permohonan Kredit dan mempersiapkan: Surat Penawaran Putusan Kredit (*Offering Letter*). Surat Penawaraan Putusan Kredit meliputi struktur dan tipe kredit yang ditelah diputuskan oleh pejabat pemutus dengan pertimbangan analisis dan evaluasi kredit pemohon. Jika pemohon menyetujui persyaratan yang terkandung dalam surat penawaran putusan tersebut, maka nasabah wajib menandatangani surat penawaran putusan kredit tersebut diatas materai dan mengembalikannya ke Bank BRI AGRO sebelum

jangka waktu *offering letter* berakhir yaitu selambat-lambatnya 14hari sejak surat penawaran diterima. Jika melewati batas waktu maka pencairan kredit tidak perlu dilakukan.

2. Berdasarkan surat penawaran putusan kredit yang telah ditandatangani oleh nasabah, ADK mempersiapkan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Pincapem. Dalam hal perjanjian kredit dibuat notariil, ADK menyiapkan copy dokumen yang berupa:copy surat penawaran, akta pendirian, atau dokumen lainnya untuk diterukan kepada notaris guna dibuahkan draft perjanjian kreditnya. Selanjutnya draft perjanjian kredit yang telah di buat oleh notaris diperiksa terlebih dahulu oleh ADK. Semua perjanjian kredit harus memuat secara lengkap unsur-unsur janji yang dikehendaki seperti yang tertuang dalam PTK, baik mengenai struktur dan tipe kredit, maupun syarat-syarat kredit lainnya.
3. Surat perjanjian kredit ditandatangani secara sah oleh pemohon dan pihak Bank BRI AGRO yaitu Pincapem dihadapan notaris.
4. Pencairan kredit dapat dilakukan setelah ADK membuat formulir Instruksi Pencairan Kredit (IPK) yang ditandatangani oleh Pincapem. Dan ADK mencatat tanggal pencairan kredit dalam Register Instruksi Pencairan Kredit.
5. *Customer service* (CS) menerima IPK dan membuat rekening baru untuk nasabah. Teller mandebetkan dana

pencairan kredit ke rekening tabungan nasabah agar dana pencairan kredit dapat diambil atau dicairkan dan digunakan untuk kepentingan usaha nasabah.

## **B. Pembahasan**

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dapat mempengaruhi karyawan dan manajemen dalam menyediakan secara layak mengenai kinerja perusahaan untuk mencapai tujuan dalam pemberian kredit. Efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak. Adapun sistem pengendalian internal pemberian kredit adalah prosedur untuk mencapai tujuan dan memberi jaminan ketelitian dalam proses pemberian kredit.

Penilaian untuk mengetahui memadai atau tidaknya sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Bank BRI AGRO KCP Tebing Tinggi, didapat dengan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Bank BRI AGRO KCP Tebing Tinggi

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan, dapat dinyatakan bahwa semua unsur pengendalian internal pemberian kredit pada PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi telah berjalan dengan efektif. Namun, masih ada kelemahan yang terjadi pada proses prakarsa dan permohonan kredit, dimana ada keterlibatan saudara antara pejabat pemrakarsa dengan calon debitur sehingga proses permohonan hanya menjadi formalitas saja menyebabkan berkas

permohonan kredit tidak diperiksa secara selektif oleh pejabat pemrakarsa dan Administrasi Kredit yang bertanggung jawab atas pemeriksaan itu.

Pada proses analisis dan evaluasi kredit, dimana kedekatan kekerabatan yang terjadi antara pejabat pemrakarsa dan calon debitur, pejabat pemrakarsan mendatangi lokasi domisili dan tempat usaha calon debitur tanpa mewawancarai calon debitur dengan selektif. Sehingga setiap analisis dibuat secara sepihak oleh pihak bank saja. Analisis 5C (watak, kondisi, modal, agunan, kemampuan) tidak dilakukan dengan selektif. Dimana analisis 5C inilah yang sangat penting untuk menilai calon nasabah. Jika dalam analisis 5C pejabat pemrakarsa sudah dilakukan dengan tidak mengikuti prosedur operasional perusahaan akan tidak mungkin akan terjadi masalah yang akan merugikan untuk bank dikemudian hari.

Pada proses keputusan pemberian kredit, pejabat pemutus banyak terlibat dengan proses permohonan dan analisis/evaluasi kredit, sehingga pejabat pemutus tidak lagi memeriksa hasil kerja pejabat pemrakarsa pada hasil analisis dan evaluasi yang telah dibuat oleh pejabat pemrakarsa. Dimana dalam standar operasional telah dijelaskan tanggung jawab pejabat pemutus, bahwa setiap analisis dan evaluasi kredit yang telah dilakukan oleh pejabat pemrakarsa dilakukan pengkajian kembali sebelum melakukan keputusan atas permohonan kredit. Hal ini cukup mengkhawatirkan jika terus berlanjut dikemudian hari bagi bank. Harus adanya tindakan lanjutan agar setiap prosedur dijalankan dengan baik dan mengikuti standar operasional perusahaan dan sistem pengendalian internal bank BRI AGRO

Faktor dan Mencegah Adanya Resiko kredit Macet

1. Faktor nasabah, dimana nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya, penyalahgunaan pembelian bahan baku dilakukan untuk pembelian aset lainnya. Nasabah yang kurang mampu mengelola usahanya, dikarenakan nasabah kurang menguasai bidang usaha akhirnya usahanya itu tidak berjalan dengan baik. Nasabah beritikad tidak baik, kredit yang awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja dan biasanya sebelum jatuh tempo kredit nasabah malah memilih untuk kabur dan menghindar untuk bertanggung jawab membayar kredit tersebut. Perilaku nasabah, bisa dilihat dari situasi nasabah yaitu yang sering tidak menjawab telepon dari pihak bank, kesehatan menurun, meninggalnya nasabah, dan lain-lain.
2. Faktor internal, dimana faktor internal perbankan yang meliputi kelemahan dalam analisis kredit, kredit agunan kelemahan sumber daya alam. Kelemahan teknologi dan kecurangan petugas bank. pihak analisis yang kurang kompeten dalam menjalankan prosedur pemberian kredit sehingga analisis dilakukan secara subjektif dengan tidak memperhitungkan resiko yang terjadi.
3. Faktor eksternal, dimana faktor eksternal bisa dilihat dari situasi ekonomi yang negatif, situasi politik dalam negeri yang merugikan, situasi alam yang merugikan dan peraturan pemerintah yang merugikan. nasabah dengan tidak sengaja membayar angsuran pinjaman akan tetapi tidak mampu dikarenakan masalah ekonomi yang membuat kegiatan usaha nasabah mengalami kebangkrutan, atau usahanya terkena hama, atau terkena bencana alam, turunnya harga sawit menyebabkan panen mengalami

penurunan. Selain itu untuk nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran tepat waktu atau menunda-nunda pembayaran.

#### Penyelesaian Kredit Bermasalah

Adanya upaya penyelesaian kredit yang dilakukan oleh Bank BRI AGRO dalam mengendalikan kredit bermasalah antara lain:

1. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai terhadap debitur yang masih mempunyai itikad baik (kooperatif) untuk menyelesaikan kewajibannya, meliputi antara lain:
  - a. Perubahan/penurunan tingkat suku bunga kredit
  - b. Keringanan Tunggakan Bunga dan atau Denda
  - c. Penjadwalan angsuran
  - d. Penjualan sebagian atau seluruh Agunan secara Di Bawah Tangan oleh debitur atau pemilik agunan untuk angsuran atau penyelesaian kewajiban debitur
  - e. Penundaan pembayaran kewajiban kewajiban bunga/pinalty
  - f. Pengurangan tunggakan/denda pokok kredit
2. Penyelesaian melalui saluran hukum, penyelesaian melalui saluran hukum atau dengan bantuan dari pihak ketiga antara lain meliputi:
  - a. Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri. Penyelesaian pinjaman melalui Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan menempuh alternatif sebagai berikut:
    - Somasi / peringatan. Somasi diajukan kepada Ketua pengadilan Negeri melalui Panitera Pengadilan Negeri.

- *Parate Executie*. *Parate Executie* dilakukan dengan cara mengajukan fiat eksekusi kepada Ketua PN atas barang agunan yang telah diikat sempurna dan nyata (Hipotik/CV/Hak Tanggungan).
  - Gugatan. Mengajukan gugatan sebagai perkara perdata biasa bila barang jaminan belum mempunyai hak kepemilikan sempurna atau bukti-bukti kepemilikan telah sempurna tetapi belum dibebankan hak tanggungan.
- b. Penjualan agunan melalui Balai Lelang Swasta dan KPKNL DJPLN/KP3N
- c. Tuntutan Kepailitan melalui Pengadilan Niaga sesuai ketentuan yang ketentuan yang berlaku.
- Penyelesaian kredit melalui saluran hukum ditempuh apabila upaya restruktursasi atau penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baik.

### 3. Penyelesaian dengan bantuan dari pihak ketiga

1. Penyelesaian kredit macet dengan bantuan kejaksaan. Penyelesaian kredit macet dengan bantuan kejaksaan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memonitor debitur yang penagihannya diminta bantuan kejaksaan agar Kanor Cabang Pembantu membuat Register penyelesaian piutang macet ke kejaksaan.

2. Penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim asuransi.  
Penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim yang risikonya dibebankan kepada perusahaan asuransi pada prinsipnya dapat dilakukan terhadap kredit yang diauransi pada prinsipnya dapat dilakukan terhadap kredit yang diasuransikan (asuransi kredit) ataupun terhadap debiturnya (asuransi jiwa).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pemberian kredit pada PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal pemberian kredit PT. Bank BRI AGRO KCP Tebing Tinggi telah berjalan dengan efektif, dimana sistem pengendalian intern pemberian kredit telah memenuhi lima komponen unsur pengendalian intern COSO (*Commitee of Sponsoring Organizations*).
2. Sistem pengendalian intern pemberian kredit PT. Bank BRI AGRO KCP Tebing Tinggi telah menerapkan semua unsur pengendalian intern. Tetapi masih terdapat kelemahan dalam pengendalian intern pada proses pemrakarsa dan permohonan kredit, analisis dan evaluasi kredit, dan keputusan pemberian kredit
3. Masih lemahnya pejabat pemrakarsa dalam menganalisis permohonan kredit Nasabah dan kelalaian Administrasi Kredit dalam memeriksa dokumen permohonan kredit nasabah. Sehingga menyebabkan kredit macet terus meningkat.

## B. Saran

Dari pembahasan hasil penelitian diatas penulis menggunakan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan yang berguna bagi PT. Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi. Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Jika diperhatikan dari keseluruhan, maka sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh PT. Bank BRI AGRO KCP Tebing Tinggi baik, meskipun demikian masih ada kelemahan dalam proses atau prosedur pengendalian pemberian kredit yaitu *Account Officer* dan Administrasi Kredit masih melakukan kesalahan dalam menganalisa kredit dan lalai dalam memeriksa kelengkapan dokumen nasabah. PT. Bank BRI AGRO KCP Tebing Tinggi harus melakukan pelatihan kepada staff atau karyawan yang akan bekerja sebagai staf kredit agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali.
2. Pimpinan harus melakukan pengecekan kembali pada laporan analisis kredit yang diterima dari pejabat pemrakarsa sebelum memberikan kredit. agar dapat menghindari kejadian kredit macet di kemudian hari.
3. Adanya penanganan terhadap nasabah yang memberikan dokumen tidak lengkap pada saat proses pengajuan kredit.

## DAFTAR PUTAKA

- Basir, Muhammad (2013). *“Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Makale”*. Skripsi.
- Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (2001). *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)*. Jakarta.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Aryanti (2011). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Hall, James A. (2012). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 4. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Haryani, Clara Niken Dwi (2014). *“Analisis Pengendalian Intern Pada Sistem Pemberian Kredit Pada Credit Bererod Gratia KK Yogyakarta”*. Skripsi.
- Harahap, Seprida Hanum (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Hasibuan, Malayu (2001). *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ismail (2010). *Akuntansi Bank*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Jusup (2010). *Auditing (pengauditan)*. Yogyakarta: Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kasmir (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi (2010). *Sistem Akuntansi*. Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Tahun 2003.
- Rivai, dan Andriana Permata Veithzal (2006). *Credit Management: Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rosalina, Pemi dan Yuliasri Rahayu (2014). *“Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Bank Danamon Cabang Kembang Jepun*

Surabaya". *Jurnal Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Vol 3 No. 11. Tahun 2014

Samosir, Hendrik Elisa Sutejo (2016). "*Analisis Efektivitas Pengendalian Inter Pemberian Kredit Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Sidikalang*". Skripsi.

Sastradipoera, Komaruddin (2004). *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan Implementasi Untuk Bersaing*. Bandung: Penerbitan Kappa Sigma.